

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan

Media massa memiliki peran yang penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Di mana, dengan adanya media massa dapat mempermudah kehidupan masyarakat dalam menjangkau setiap informasi atau peristiwa yang berada jauh dan tidak terjangkau oleh indera. McQuail, (2010, h. 16) menyebut bahwa media massa mempunyai fungsi sebagai '*windows on event and experience*' atau jendela dalam melihat peristiwa dan kejadian. Artinya, dengan adanya media massa itu, masyarakat dapat melihat secara keseluruhan mengenai sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi tanpa harus datang ataupun berkunjung ke tempat peristiwa atau kejadian itu terjadi. Media massa juga membantu seseorang dalam mendapatkan atau memperoleh suatu informasi dengan mudah dan cepat.

Berdasarkan pernyataan di atas dan media massa dianggap memiliki peran yang begitu penting bagi kehidupan sosial masyarakat, sehingga membuat dan mengharuskan media massa untuk menyajikan berita-berita yang layak untuk diterima publik. Berita yang digolongkan atau termasuk dalam kategori layak adalah berita yang mencangkup ataupun di dalamnya terdapat sebuah informasi yang bersifat penting, aktual, akurat, faktual, serta penting, (Suryawati, 2014, h. 69). Namun, kini pemberitaan telah bergeser dari kategori berita yang layak untuk diberikan kepada masyarakat. Pasalnya, kini media massa tidak sepenuhnya

memenuhi syarat-syarat berita yang dianggap layak tersebut. Media massa dianggap mempunyai kendali atas informasi atau kejadian apa saja yang harus disajikan dan diketahui masyarakat. Karena, informasi atas kejadian atau peristiwa itu begitu banyak, sehingga akan ada keterbatasan jurnalis dan media massa dalam mengolahnya hingga tempat penyajian beritanya. Griffin, (2019, h. 368) memaparkan seorang editor berita dalam suatu media massa akan memilih isu atau peristiwa mana yang dianggap lebih penting, dan pada tahap ini akan dimainkan agenda media tersebut. Dengan kata lain, media massa mempunyai sebuah kemampuan atau kendali dalam memindahkan sebuah arti penting mengenai suatu peristiwa pada agenda mereka dan menjadikan itu sebagai agenda publik.

Dalam membuat agenda media itu, media massa akan mengemas atau membungkus sebuah peristiwa atau kejadian menjadi sebuah berita sesuai dengan ideologi yang dianut dan kepentingan oleh masing-masing media. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Eriyanto, (2011, h. 29) bahwa berita pada media massa adalah hasil konstruksi sosial. Di mana, selalu melibatkan sebuah pandangan, nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh masing-masing media atau wartawan. Sehingga, dapat dikatakan, berita yang disajikan oleh media massa tidak seutuhnya memberikan gambaran tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Karena sudah terdapat atau memuat ideologi serta kepentingan masing-masing media massa.

Pernyataan mengenai media massa memiliki agenda media dalam mengkonstruksi informasi atau peristiwa menjadi sebuah berita didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Di mana, media massa dianggap memiliki agenda

medianya masing-masing, (Christandar, 2013). Karena dalam agenda media tersebut akan dipengaruhi oleh sebuah ideologi, di mana tiap media massa memiliki ideologi yang berbeda satu sama lain. Lebih lanjut, Wahono (2017) menyebut bahwa agenda media dipengaruhi oleh kebijakan redaksional. Kebijakan redaksional tersebut, dipengaruhi beberapa faktor yaitu ideologi, ekonomi, politik, serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Saat ini, media massa juga dianggap memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat demokratis, seperti di Indonesia. Media massa berperan sebagai alat kontrol sosial serta disebut-sebut sebagai pilar keempat demokrasi. Seperti mengutip dari Malcolm X (1964) menyebut media massa adalah entitas terkuat di muka bumi. Karena, media massa memiliki kemampuan dalam pembentukan dan pengendalian kesadaran masyarakat. Dengan kata lain, media massa dapat dengan mudah menentukan sesuatu informasi atau kejadian yang dianggap baik dan buruk untuk masyarakat. Dengan peran media massa sebagai tiang keempat Negara itu, media massa memainkan peran penting sebagai jembatan ataupun saluran informasi bagi pemerintah kepada masyarakat.

Salah satu yang turut ambil peran besar dalam agenda media tersebut adalah kepemilikan media. Pemilik media mempunyai kendali penuh atas isi pemberitaan, dan dapat meminta medianya untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu informasi atau peristiwa, (Morissan, 2008, h. 22). Isi pada suatu berita selalu mencerminkan atau memperlihatkan kepentingan dari sang pemodal atau mereka yang membiayai media itu, (Altschull, 1984). Sehingga tak bisa dipungkiri, bahwa pendiri dan pemilik media massa itu, dapat mengatur setiap informasi yang dimuat

menjadi berita untuk diberikan kepada publik atau masyarakat. Isi pemberitaan itu, tentunya sesuai dengan keinginan pemilik atau pemodal media massa.

Adanya pengaruh atau kepentingan sang pemilik media yang diberikan ke dalam berita tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat. Semakin buruk, jika pemilik atau pemodal media massa itu turut berkecimpung di dalam dunia politik. Karena, dapat mempengaruhi pemikiran dari publik. Menurut Stroud (dikutip dari Shoemaker & Reese, 1996), pengaruh pemilik media yang berkecimpung di dalam dunia politik kepada sebuah konten atau isi pemberitaan pada media adalah hal yang biasa atau lumrah terjadi. Serta dapat dengan mudah ditemui pada berbagai media yang mempunyai kecenderungan yang partisan.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa pendiri dan pemilik media massa yang berkecimpung dan turut ambil peran besar di dalam dunia politik nasional. Seperti misalnya Surya Dharma Paloh selaku pemilik Media Group. Di mana, Media Group membawahi beberapa media massa, di antaranya, Metro TV, Media Indonesia, hingga media online [Mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com). Selain memiliki media massa, Surya Paloh juga merupakan pendiri Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Kini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Organisasi Masyarakat Partai Nasdem, (Tirto.id, 2016). Kemudian, Hary Tanoesoedibjo sebagai pemilik dari MNC Group yang membawahi RCTI, Global TV, MNC TV, Koran Sindo, okezone.com, sindonews.com dan beberapa radio ternama, (Viva.co.id, 2015). Di bidang politik, Hary merupakan pendiri sekaligus ketua umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Tak hanya Hary, beberapa anggota keluarganya juga terjun ke dunia politik, salah satunya Angela Tanoesoedibjo yang duduk menjadi Wakil

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo, (Egeham, 2019). Selanjutnya, Abdurizal Bakrie selaku pemilik Bakrie Group, di mana terdapat media-media besar seperti ANTV, TVOne, dan media online. Disamping itu, Abdurizal Bakrie juga merupakan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar). Tak main-main, pria 74 tahun itu juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada 2009 silam. Kini, Abdurizal Bakrie menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar hingga 2024 mendatang, (Viva.co.id, 2019).

Melihat peranan media massa yang begitu penting hingga bisa mempengaruhi opini masyarakat. Tak jarang media massa kerap digunakan dalam aktifitas politik. Seperti misalnya pada Pemilihan Umum Presiden, pada saat itu menjadi perhatian masyarakat dan media massa. Masing-masing media massa menyajikan informasi menjadi berita yang telah diproses melibatkan ideologi media. Media-media yang dimiliki oleh orang yang duduk partai politik juga memanfaatkan kekuatannya dalam menggunakan media dalam ajang promosi. Seperti misalnya Hary Tanoesoedibjo pada saat menjadi calon presiden, ia seringkali muncul dilayar televisi miliknya yaitu MNC, hingga RCTI dalam menyampaikan aktivitas politik. Kemudian Surya Paloh yang seringkali menyampaikan aktivitas politiknya pada media massa yang dimilikinya. Beberapa media massa lainnya juga turut menyampaikan informasi secara subjektivitas akibat ideologi yang dianut masing-masing media ke dalam berita.

Dalam proses pemilihan informasi menjadi berita, akan menghasilkan kecenderungan atau nada pemberitaan. Masing-masing media akan berbeda-beda

dalam menghasilkan kecenderungan atau nada pemberitaan itu. Karena, nada pemberitaan yang terbentuk akibat adanya agenda media, hingga ideologi yang dianut oleh masing-masing media.

Peristiwa yang cukup banyak dilirik atau disoroti masyarakat dan media massa baik cetak, online hingga radio pada awal bulan Januari 2020 itu adalah terkait kasus korupsi yang terjadi pada proses Penggantian Antar Waktu (PAW). Untuk diketahui, dalam struktur ketatanegaraan, Indonesia memiliki perwakilan yang berasal dari pilihan rakyat untuk memegang kekuasaan legislatif. Di mana pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat itu dilakukan melalui skema Pemilihan Umum (Pemilu). Sehingga, mereka yang terpilih melalui Pemilu akan menjadi anggota legislatif yaitu DPR/DPRD/DPD dan memegang tanggung jawab. Namun, dalam pelaksanaannya, kedudukan sebagai anggota legislatif itu bisa digantikan dengan anggota lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Mekanisme pergantian jabatan itu yang dinamakan dengan Penggantian Antar Waktu (PAW), (Prawira & Dewi, 2019).

Berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014, mekanisme PAW dilakukan karena anggota legislatif tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Mekanisme sesuai UU, calon PAW akan diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang memperoleh suara tertinggi kedua dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama. Nama anggota DPR yang diberhentikan antar waktu dan nama calon pengganti antar waktu diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk

nantinya, KPU akan menyampaikan kepada Pimpinan DPR, (Prawira & Dewi, 2019).

Dalam kasus pada awal tahun tersebut, Wahyu Setiawan yang merupakan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka terjerat dalam kasus dugaan suap terkait proses PAW anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP 2019-2024. Di mana, dalam kasus itu Wahyu diduga menerima suap untuk membantu meloloskan mantan kader PDI Perjuangan, Harun Masiku menjadi pengganti antar waktu menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal, pada saat itu, Harun tidak memiliki suara terbanyak kedua sesuai dengan ketentuan UU yang mengatur PAW.

Pada kasus itu, tidak hanya Wahyu yang menjadi sorotan media, namun nama Harun Masiku turut menjadi incaran media. Selain keberadaan Harun yang masih buron hingga saat ini, namun juga karena Harun berasal dari partai besar di Indonesia, yang juga sedang merajai bangku pemerintahan Indonesia. Di mana Presiden RI, Joko Widodo turut berasal dari partai yang sama dengan Harun yaitu PDI Perjuangan. Berdasarkan, hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia (PPI) bersama Indo Barometer dan Politika Research & Consulting (PRC), memperlihatkan bahwa PDIP memiliki elektabilitas tertinggi sebagai partai politik, yaitu sekitar 20 persen, (Lidwina, 2020).

Kasus ini semakin menarik untuk diteliti karena dalam pemberitaannya media massa mulai mengaitkan dengan beberapa pihak yang memiliki nama besar atau *public figure* dengan belum ditemukannya Harun Masiku. Beberapa pejabat

yang disoroti, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly; hingga keterlibatan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Adapun fokus penelitian ini, lebih menyoroti soal nama Hasto Kristiyanto di dalam pusaran kasus PAW. Ini menjadi menarik, karena di dalam berita acara penetapan (BAP) tersangka Wahyu bersama ketiga tersangka lain, sangat minim menyebutkan nama Hasto. Bahkan, pihak KPK sendiri, tidak pernah menyebutkan keterlibatan Hasto dalam kasus ini. Namun, pada kenyataannya, media-media cetak, TV hingga online banyak yang menyeret nama Hasto hingga menyebut Hasto terlibat dalam kasus ini. Ketertarikan media massa dengan Hasto ini menjadi menarik untuk diteliti. Apalagi, melihat Hasto yang menduduki jabatan tinggi di PDIP. Menurut Brook dalam (Suryawati, 2014), suatu berita memiliki nilai jika di dalamnya terdapat *public figure* atau orang yang memiliki peranan penting. Sehingga, apa yang dilakukan Hasto atau apa yang terjadi pada dirinya atau seorang *public figure* tentu akan menarik perhatian public

Penelitian ini semakin menarik, karena peneliti memilih tiga media online yang terafiliasi atau dimiliki oleh petinggi atau menduduki jabatan penting dalam sebuah partai politik. Media online pertama adalah Mediaindonesia.com yang dimiliki oleh Surya Paloh. Surya Paloh adalah pendiri Partai Nasdem. Kini, ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Organisasi Masyarakat Partai Nasdem, (Tirto.id, 2016). Kemudian, media online kedua yaitu Okezone.com. Di mana, Okezone.com dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo. Dalam jabatan politik, Hary

adalah pendiri sekaligus ketua umum Perindo, (Egeham, 2019). Selanjutnya, adalah Viva.co.id yang dimiliki oleh Abdurizal Bakrie. Abdurizal Bakrie juga berasal dari dunia politik, di mana, ia berasal dari Partai Golkar. Kini, Abdurizal Bakrie menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar hingga 2024 mendatang, (Viva.co.id, 2019).

Pemilihan media online dalam penelitian ini merupakan pilihan yang tepat, melihat perkembangan zaman dan teknologi komunikasi informasi saat ini, di mana media tradisional termasuk media cetak semakin tergeser dengan adanya media online. Berdasarkan Survei Nielsen Consumer & Media View di tahun 2017, menunjukkan bahwa pembaca di Indonesia lebih banyak membaca media digital dibandingkan media cetak, (Reily, 2017). Ini didasari oleh jumlah pembeli koran terus menurun selama beberapa tahun. Pada penelitian terdahulu juga belum pernah ada yang meneliti ketiga media online dengan dikaitkan dengan kepemilikan media secara bersamaan. Peneliti juga menganggap media yang terafiliasi partai politik ini sangat penting untuk diteliti. Apalagi sebagai pilar demokrasi dan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengetahui situasi atau informasi yang tidak dapat dijangkau dengan mata, media massa berperan sangat sentral dan penting. Karena tidak dapat dipungkiri, ideologi yang terbentuk dari pemilik media massa yang turut ambil peran di dalam dunia politik, turut mempengaruhi pemberitaan yang dihasilkan. Karena media massa ibarat jendela bagi masyarakat dalam memandang dunia, sehingga, apa yang dihasilkan yang disajikan oleh media massa dianggap sebagai realitas yang sebenarnya.

Dari ketiga media online yakni Mediaindonesia.com, Okezone.com, dan Viva.co.id, peneliti akan melihat bagaimana nada pemberitaan masing-masing media dalam mengemas informasi mengenai Hasto dalam pusaran kasus korupsi PAW. Peneliti menganggap penelitian mengenai nada pemberitaan ini penting untuk diteliti, karena dapat melihat bagaimana nada pemberitaan terbentuk akibat subjektivitas atau campur tangan kepemilikan media. Apalagi, melihat peranan media massa yang begitu penting hingga bisa mempengaruhi opini publik, sehingga sangat perlu penelitian mendalam mengenai nada pemberitaan ini.

Penelitian mengenai nada pemberitaan memang telah dilakukan penelitian terdahulu (Christandar, 2013) (Setiawan, 2013) (Wahono, 2017). Namun, mereka tidak secara spesifik menghubungkan antara kepemilikan media yang terafiliasi dengan partai politik dengan nada pemberitaan yang dihasilkan. Seperti penelitian Christandar (2013), melihat nada pemberitaan terbentuk dari ideologi keagamaan yang dimiliki media. Ketiganya juga hanya menjelaskan bagaimana nada pemberitaan pada suatu media, tanpa merincikan bagaimana nada pemberitaan itu terbentuk. Serta, dari nada pemberitaan itu, ketiga penelitian terdahulu tidak memperlihatkan perbedaan antar media dalam mengemas atau membingkai informasi menjadi berita. Penelitian terhadap peristiwa mengenai Hasto dalam pusaran kasus korupsi PAW juga belum pernah dilakukan. Karena, kasus ini masih terbilang baru terjadi pada awal bulan Januari 2020, (Christandar, 2013) (Setiawan, 2013) (Wahono, 2017).

Berita-berita yang dipilih untuk diteliti dari ketiga media online itu, merupakan berita yang terkait Hasto Kristiyanto dalam pusaran kasus PAW sejak

tanggal 9 Januari 2020 pada saat Kasus PAW dimulai, hingga 9 Juli 2020. Adapun rumusan masalah berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian di atas yaitu;

1. Bagaimana nada pemberitaan mengenai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krisyanto dalam pusran kasus korupsi PAW pada tiga media online yaitu Mediaindonesia.com, Okezone.com dan Viva.co.id, yang terafiliasi dengan partai politik?
2. Bagaimana perbedaan dari nada pemberitaan antara ketiga media online yakni Mediaindonesia.com, Okezone.com dan Viva.co.id dalam memberitakan Sekjen PDIP Hasto Krisyanto dalam pusran kasus PAW?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana nada pemberitaan mengenai Sekjen PDIP Hasto Krisyanto didalam pusran kasus korupsi PAW pada tiga media online yaitu Mediaindonesia.com, Okezone.com, dan Viva.co.id, yang terafiliasi dengan partai politik. Serta, menjelaskan bagaimana perbedaan nada pemberitaan ketiga media online tersebut. Sehingga nantinya, dapat terlihat apakah ada atau tidaknya pengaruh kepemilikan media yang berkecimpung di dunia politik dalam menentukan arah atau nada pemberitaan sebuah media.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan pada penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat untuk semua pihak, terutama kepada penulis, dan pembaca. Adapun uraian manfaatnya, dalam aspek akademis, melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat

berkontribusi dalam mempertajam ilmu pengetahuan komunikasi tentang agenda media dan nada pemberitaan. Khususnya, agenda media dan nada pemberitaan terkait dengan media-media yang terafiliasi atau dimiliki oleh seseorang yang berkecimpung dalam dunia politik.

Kemudian manfaat praktis, dari hasil penelitian diharapkan memberikan masukan untuk intansi media khususnya tiga media online yang menjadi objek penelitian yaitu Mediaindonesia.com, Okezone.com, dan Viva.co.id, dalam memberikan dan menyajikan sebuah peristiwa atau kejadian menjadi sebuah berita agar bersifat objektif atau memberikan informasi yang apa adanya, tanpa memasukkan ideologi yang dianut. Termasuk dengan kepentingan politik pemiliki media. Melihat dari peran media yang sangat berpengaruh bagi masyarakat.

Selanjutnya, manfaat sosial, dengan adanya penelitian ini bisa memberikan masukan kepada masyarakat untuk lebih kritis dan teliti lagi dalam memilah dan menyerap informasi di dalam sebuah berita. Serta, tidak terburu-buru dalam menyimpulkan suatu informasi dalam sebuah berita karena dikhawatirkan terdapat suatu kepentingan didalam sebuah pemberitaan.